

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rangkaian pemerintah agar dapat mewujudkan *good governance* dan *clean governance*. *Good governance* adalah suatu konsep dimana proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama sebagai hasil dari suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.¹

Pemerintah yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintah harus dapat mengelola sumber daya yang ada, salah satunya yang terpenting adalah keuangan. Pemerintah adalah entitas pelapor yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan, penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat, dan terdapat pemisahan antara manajemen dan kepemilikan sumber-sumber tersebut.²

¹ Nunuy Nur Afiah, *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pada Entitas Akuntansi* (Jakarta: Kencana 2020), 1.

² Enita Binawati dan Cyrenia Tri Nindyaningsih, "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Dinas-Dinas SKPD Di Kabupaten Klaten)", *Optimal*, Vol. 19, No.1, Maret 2022, 20.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk a) membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, b) menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, c) membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan, serta d) membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.³

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan serta kinerja pemerintah, agar supaya laporan keuangan dan kinerja pemerintah yang dimaksud dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.⁴

Hal yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah manfaat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah.⁵ Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

³ Freddy Samuel Kawatu, *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*, (Yogyakarta: Cv. Budi Utama 2019), 7.

⁴ Novtania Mokoginta, dkk, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah", *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 12, No. 02, Tahun 2017, 874.

⁵ Nuraini Ismail, dkk, "Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pengendalian Internal, Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo", *Open Journal Systems*, Vol. 15 No. 12 Juli 2021, 5889.

ditetapkan sebelumnya. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik diantaranya yaitu mengenai laporan keuangan yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan. Hal terakhir yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian intern pemerintah itu sendiri.⁶

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan kumpulan dari subsistem-subsistem yang di dalam setiap subsistem tersebut peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi berbagai laporan keuangan untuk pihak eksternal maupun internal pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah dalam satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas. Laporan keuangan merupakan salah satu media bagi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada publik.

Sistem pengendalian internal dalam laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting dan harus kita perhatikan, agar tercapai efisiensi, kemanfaatan dan pencegahan kerugian keuangan nasional, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah. Sistem Pengendalian Internal merupakan proses integral dari tindakan dan aktivitas yang dilakukan secara terus menerus oleh

⁶ Dito Aditia Darma Nasution, Monograf Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Tanjung Balai Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia 2019), 1.

pimpinan dan seluruh karyawan untuk memberikan jaminan yang memadai bagi pencapaian tujuan organisasi.⁷

Laporan keuangan merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas suatu entitas serta media informasi akuntansi untuk bisa menyampaikan hasil kinerja pengelolaan keuangan kepada pihak lain. Kualitas merupakan sesuatu yang memenuhi atau melebihi kriteria yang telah ditetapkan. Laporan keuangan pemerintah yang berkualitas merupakan salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik.⁸ Menurut PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; Informasi dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas jika informasi tersebut memenuhi kriteria dalam akuntansi pemerintahan yaitu relevan (relevance), andal (reability), dapat dipahami (understandability), dan dapat di bandingkan (comparability).⁹

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Kabupaten Pamekasan merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 7 kali berturut-turut sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2021. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan “jaminan” bahwa laporan keuangan yang

⁷ Sri Dewi Anggadini, dkk, “Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Dampak Dari Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah”, *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 12, No. 2, Mei– Agustus 2021, 166.

⁸ Dito Aditia Darma Nasution, *Ibid*, 2.

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta 2010.

disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya.

Meski mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut, dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 terhadap delapan pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan tersebut di antaranya: terdapat pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap yang masih belum memadai, terdapat penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang masih belum memadai, terdapat kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang belum sepenuhnya memadai, terdapat Penatausahaan Persediaan atas bantuan COVID-19 Tahun Anggaran 2021 yang masih belum memadai, terdapat kemahalan harga Pengadaan Barang Penanganan COVID-19 dari Belanja Tak Terduga, terdapat kekurangan volume atas pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal, terdapat pencatatan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar yang masih belum memadai, terdapat pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) yang masih kurang memadai.

Sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 diserahkan, BPK telah meminta tanggapan kepada delapan pemerintah daerah atas Konsep Hasil Pemeriksaan BPK, termasuk rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh ke delapan pemerintah daerah tersebut. Dengan demikian, rekomendasi BPK atas beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah daerah, sehingga tata kelola keuangannya menjadi lebih akuntabel. Fenomena ini

melanggar ruang lingkup kualitas laporan keuangan yang tidak relevan dalam arti tidak tepat waktu akibat masalah pengelolaan aset yang belum terselesaikan, tidak lengkap, dan tidak tuntas, karena masih terdapat masalah yang harus ditindaklanjuti.¹⁰

Laporan yang berkualitas biasanya dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal pemerintah dan penerapan sistem akuntansi keuangan. Pengendalian internal dibutuhkan agar mudah dalam menemukan atau menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada atau permasalahan yang mungkin akan timbul dalam proses pencapaian tujuan sehingga pencapaian tujuan bisa kita ketahui secara jelas. Dalam meningkatkan kinerja pemerintah yang paling umum terjadi ialah korupsi, kesalahan administrasi serta pengelolaan keuangan yang tidak berjalan dengan baik.

Penerapan sistem akuntansi keuangan yang akuntabel serta dengan pengendalian yang bersistem dan terorganisir akan mampu memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan. Penerapan sistem akuntansi keuangan yang terarah diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan untuk memperoleh hasil laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang

¹⁰ Pamekasan Hebat, *Laporan Keuangan Pemkab Pamekasan 2020 Raih Predikat WTP*, <https://pamekasanhebat.com/2021/05/25/laporan-keuangan-pemkab-pamekasan-2020-raih-predikat-wtp/> (Diakses Pada 2 April 2022).

mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.¹¹

Enita dan Cyrenia, menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan sistem pengendalian internal juga berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Nuraini, Apriana, dan Elsensiana, menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari kasus dan masalah yang telah terjadi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal. Dengan itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh secara langsung antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan?

¹¹ Ira Gustina, “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 10, No. 1, Januari – Juni 2021, 57.

2. Apakah ada pengaruh secara langsung antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan?
3. Apakah ada pengaruh secara simultan antara sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah disampaikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh secara langsung antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk menganalisis pengaruh secara langsung antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan antara sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan.

D. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian adalah anggapan dasar atau postulat tentang suatu hal berkenaan dengan masalah penelitian yang kebenarannya sudah diterima oleh

peneliti.¹² Di dalam penelitian, anggapan-anggapan semacam ini sangatlah perlu dirumuskan secara jelas sebelum melangkah mengumpulkan data.¹³ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan.

1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik.
2. Sistem Pengendalian Internal, hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai agar tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian penyelenggaraan pemerintah negara/ daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Artinya, apabila sistem pengendalian internal dilaksanakan dengan baik, maka seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan daerah akan berjalan dengan baik sehingga akan memberikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan yang berkualitas.

¹² Mohammad Kosim, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Pamekasan: IAIN Madura, 2020), 16.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 58.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis terdiri dari dua kata yaitu dari kata “hypo” yang berarti sebelum dan “thesis” yang berarti dalil. Jadi hipotesis berarti dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sebenarnya, karena perlu pembuktian terhadap kebenarannya. Hal ini diperkuat oleh pendapat yang menyatakan bahwa hipotesis diartikan sebagai rumusan jawaban sementara yang harus diuji melalui kegiatan penelitian.¹⁴

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini:

H₀₁: Tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan.

H_{a1}: Ada pengaruh positif dan signifikan antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan.

H₀₂: Tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan.

H_{a2}: Ada pengaruh positif dan signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan.

H₀₃: Tidak ada pengaruh secara simultan antara sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan.

¹⁴ Turkiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 24.

H_{a3}: Ada pengaruh secara simultan antara sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi pengembangan ilmu akuntansi terutama terkait pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang ilmu akuntansi khususnya tentang pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Bagi IAIN Madura

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian

internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta menjadi referensi tambahan pada perpustakaan.

c. Bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan tambahan atau solusi bagi pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi serta juga menjadi solusi bagi pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan di tahun mendatang.

G. Ruang Lingkup

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang meliputi variabel dan objek penelitian.

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian dapat membedakan atau membawa variasi pada suatu nilai tertentu. Variabel penelitian pada dasarnya adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁵ Ada dua jenis variabel yang diuji dalam penelitian ini yaitu variabel dependen dan variabel independen. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas (*independent variable*) yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel terikat. Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel terikat yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 38.

Dalam penelitian ini sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal (bebas) dan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen (terikat).¹⁶

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.

H. Definisi Istilah

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati. Secara tidak langsung definisi operasional tersebut akan menunjuk pada alat pengambil data yang cocok digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur suatu variabel. Dalam sebuah penelitian definisi istilah atau definisi operasional diperlukan apabila diperkirakan akan timbul perbedaan pengertian atau kurang jelas makna seandainya penegasan istilah tidak diberikan. Istilah yang perlu diberikan penegasan adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep yang terdapat dalam skripsi. Definisi istilah dapat berbentuk definisi operasional variabel yang akan diteliti. Secara tidak langsung definisi operasional tersebut akan menunjuk pada alat pengambil

¹⁶ Chandra Christalisana, "Pengaruh Pengalaman dan Karakter Sumber Daya Manusia Konsultan Manajemen Konstruksi Terhadap Kualitas Pekerjaan Pada Proyek Di Kabupaten Pandeglang", Jurnal Fondasi, Vol. 7, No. 1, Tahun 2018.

data yang cocok digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur suatu variabel.¹⁷

Definisi istilah dalam penelitian ini dengan judul “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan” adalah:

1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Definisi Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah.¹⁸

Berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 yang terdapat pada pasal 232 menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan:¹⁹ “serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer.”²⁰

2. Sistem Pengendalian Internal

Definisi Sistem Pengendalian Internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah

¹⁷ Ismail & Bambang Triyanto, *Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) Suatu Pedoman*, (Klaten: Lakeisha, 2019), 52.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta 2005.

¹⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta 2006.

²⁰ Monika Handayani, *Akuntansi Sektor Publik*, (Banjarmasin: Poliban Press, 2019), 92.

“sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.²¹

3. Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah: “Laporan keuangan daerah di susun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan”.²² Sedangkan menurut Mahmudi definisi laporan keuangan adalah: “Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholders* dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas”.²³

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.²⁴

²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Jakarta 2008.

²² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta 2006.

²³ Oka Reza Aditya, “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”, Jurnal Sikap, Vol 2, No. 1, 2017, 53.

²⁴ Whella Puput Wiranti, “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan, Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD”, Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Vol. 10, No. 5, Mei 2021, 4.

I. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun pada penelitian ini peneliti juga ingin menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Melalui hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menjadi dasar atau acuan yang perlu dilakukan yang berupa temuan-temuan yang dapat dijadikan sebagai data pendukung. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini terkait dengan masalah pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1

Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nuraini Ismail, Apriana Marselina, dan Elsensiana Bupu Loda	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pengendalian Internal, Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas	Analisis Regresi Linier Berganda, Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Hipotesis.	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Signifikan Terhadap Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel Pengendalian

		Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo		Internal Berpengaruh Signifikan Terhadap Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2.	Enita Binawati	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Dinas-Dinas Skpd Di Kabupaten Klaten	Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Hipotesis.	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3.	Erwin Siahaya, Meinarni Asnawi, dan Paulus K. Allo Layuk	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua	Analisis Regresi Linier Berganda, Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Hipotesis.	Sitem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah KLKPD Provinsi Papua. Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Secara Signifikan Dan Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD) Provinsi Papua.
4.	Aditya Sanjaya	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan	Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Hipotesis.	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar.

		Daerah, Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Skpd Kabupaten Kampar)		Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar
5.	Rifka Dwi Apriliani, Hadi Sasana, dan Endang Kartini Panggiarti	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap	Analisis Regresi Linier Berganda, Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Hipotesis.	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Sistem Pengendalian Internal Tidak Berpengaruh Positif Dan

		Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.
--	--	---	--	--

Dari beberapa hasil penelitian yang dipaparkan diatas, dapat diketahui judul penelitian, metode penelitian, dan hasil pembahasan pada penelitian terdahulu tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Adapun persamaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu adalah variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta menggunakan metode yang sama. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independen (x) yaitu sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal, sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebanyak 35 SKPD yang ada di pemerintah Kabupaten Pamekasan, serta tahun penelitian yang berbeda saat dilakukan penelitian.